



PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA

Jl. Komodo No.34 Juwana

LAPORAN TATA KELOLA TAHUN 2024



BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan SEOJK No.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Pertanggungjawaban
- Independensi
- kewajaran

Manajemen PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparency) sebagaimana dimaksud dalam POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA tahun 2024 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

BAB II**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR****A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola**

Nama BPR	PT BPR Juwana Artha Sentosa
Alamat	Jl. Komodo No.34 Juwana
Nomor Telepon	0295 471 488
Penjelasan Umum	Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola dinilai berdasarkan 12 faktor mengacu pada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Perekonomian Rakyat
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	Desey Ade Setiyarini,S.Sos
	Jabatan	Direktur Utama dan YMFK
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR2. Menentukan kebijakan umum dalam memimpin bank untuk mencapai tujuan perusahaan3. Bertanggungjawab dan mengurus perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan4. Menyusun rencana kerja bank setiap tahun bersama- sama dengan semua anggota Direksi

2.	Nama	Pebruono,SE.,MM
	Jabatan	Direktur Bisnis
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan meningkatkan prudential banking agar dalam kegiatan bisnis bank senantiasa berpedoman pada SOP dan Kebijakan Kepatuhan serta Manajemen Risiko. 2. Menyusun perencanaan dan konsep-konsep strategis pencapaian sasaran -sasaran kerja sesuai dengan perencanaan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama. 3. Membuat keputusan dalam pemberian kredit sesuai dengan batas wewenangnya 4. Meningkatkan jumlah penyaluran kredit dan penghimpunan dana dari pihak ketiga. 5. Melakukan pembinaan dan penyelesaian atas kredit- kredit bermasalah agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga.

	6.	Mengkoordinasi dan memantau pelaksanaan satuan kerja dibawah Direktur Bisnis.
	7.	Bertanggung jawab atas penyusunan garis- garis kebijakan perusahaan khususnya dibidang perkreditan dan penghimpunan dana.
	8.	Mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan bisnis bank.
	9.	Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor termasuk pada semua unit kerja
	10.	Melakukan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi.
	11.	Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan hadir
	12.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit kerja yang ada dibawahnya.
	13.	Menerapkan penerapan tata kelola yang baik dalam kegiatan usaha dan bisnis bank.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
	1.	Direksi sudah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris mengenai revisi rencana bisnis bank tahun 2024.
	2.	Direksi sudah menindaklanjuti evaluasi Dewan Komisaris mengenai pencapaian bisnis bank setiap bulan.
	3.	Direksi sudah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris untuk melaksanakan pendidikan intern kepada karyawan.
	4.	Direksi sudah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris mengenai evaluasi strategi penyelesaian kredit bermasalah
	5.	Direksi sudah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	Siti Rokhayati, SE
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti

2.		temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/ atau otoritas lainnya.
		4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
	Nama	Prabowo Budhy Utomo
	Jabatan	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dekom, OJK atau otoritas lainnya Memberitahukan kepada OJK mengenai pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan dan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
Rekomendasi Kepada Direksi : <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penambahan SDM dibagian marketing dan mengevaluasi SDM yang ada. Secara berkala dilakukan pelatihan intern untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM Mengupayakan rasio -rasio TKS bank tetap berada dalam posisi sehat. Meningkatkan kinerja bisnis bank sesuai dengan target rencana bisnis Melakukan langkah- langkah penyelesaian kredit bermasalah dan mengupayakan penurunan rasio NPL Memastikan pemenuhan komitmen dan tindak lanjut pemeriksaan OJK, serta temuan audit terkait sudah dipenuhi Memastikan pelaksanaan APUPPT dan Manajemen Risiko dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik dalam setiap kegiatan bisnis bank Memastikan pelaksanaan tata kelola bank yang baik sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku. 		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
a. Tugas, Tanggung Jawab , Program Kerja , dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1.	Komite Audit	
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Tidak Ada
	Program Kerja	Nihil
	Realisasi	Nihil
	Jumlah Rapat	0
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Tidak Ada
	Program Kerja	Nihil
	Realisasi	Nihil
	Jumlah Rapat	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Tidak Ada
	Program Kerja	Nihil
	Realisasi	Nihil
	Jumlah Rapat	0
4.	Komite Manajemen Risiko	
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Tidak Ada
	Program Kerja	Nihil
	Realisasi	Nihil
	Jumlah Rapat	0
5.	Komite Lainnya	
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab	Tidak Ada
	Program Kerja	Nihil
	Realisasi	Nihil
	Jumlah Rapat	0

b. Struktur , Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian (**)	Komite (***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunesasi & Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	Desey Ade Setiyarini, S.Sos	0	0,00	0	0,00
2	Pebruono,SE.,MM	0	0,00	0	0,00

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	Siti Rokhayati,SE	0	0,00	0	0,00
2	Prabowo Budhy Utomo	0	0,00	0	0,00

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Desey Ade Setiyarini,S.Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00
2	Pebruono, SE., MM	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Siti Rokhayati,SE	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00
2	Prabowo Budhy Utomo	Tidak Ada	Tidak Ada	0,00

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Desey Ade Setiyarini,S.Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Pebruono, SE., MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Siti Rokhayati,SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Prabowo Budhy Utomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Desey Ade Setiyarini,S.Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Pebruono, SE., MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Siti Rokhayati,SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Prabowo Budhy Utomo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	Rp 259.500.000	2	Rp 240.000.000
2	Tunjangan	2	Rp 230.500.000	2	Rp 168.000.000
3	Tantiem	1	Rp 36.000.000	2	Rp 44.000.000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya **)	0	0	0	0
Total Remunerasi			Rp 526.000.000		Rp 452.000.000
	Jenis Fasilitas Lain				
1	Perumahan	1	Rp 10.500.000	1	Rp 15.000.000
2	Transportasi	2	Rp 108.787.500	2	Rp 94.312.500
3	Asuransi Kesehatan	2	Rp 9.312.215	2	Rp 17.926.300
4	Fasilitas Lainnya ***)	2	Rp 14.250.000	2	Rp 12.000.000
Total Fasilitas Lain			Rp 142.849.715		Rp 139.238.800
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			Rp 668.849.715		Rp 591.238.800

Paket remunerasi yang disajikan diatas merupakan total remunerasi yang diterima oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,05 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,27 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,19 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,51 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,80 : 1

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah berdasarkan data gaji tahun 2024

I. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	05/01/2024	2	1. Evaluasi Laporan Kinerja Akhir Tahun 31 Desember 2023. 2. Evaluasi Komitmen Bagian Bisnis Pencapaian Pertumbuhan Pinjaman. 3. Evaluasi Komitmen Remedial terhadap penyelesaian kredit bermasalah.
2	12/01/2024	2	1. Evaluasi Kinerja bank sampai dengan 11 Januari 2024. 2. Pembahasan NPL yang masih tinggi , belum ada progress perbaikan 3. Evaluasi action plan NPL yang sudah masuk kualitas macet untuk didaftarkan lelang
3	07/02/2024	2	1. Evaluasi kinerja akhir bulan Januari 2024. 2. Membahas tugas dan tanggung jawab Manager Bisnis. 3. Penanganan NPL untuk kredit bermasalah yang masih menjadi kendala. 4. Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko , dan APU PPT.
4	07/03/2024	2	1. Evaluasi kinerja akhir bulan Februari 2024. 2. Pencapaian laba bulan Februari 2024. 3. Himbauan prinsip kehati-hatian dan prudential banking dalam penyaluran kredit.
5	05/04/2024	2	1. Evaluasi kinerja akhir bulan Maret 2024. 2. Pembahasan NPL yang masih tinggi, belum terdapat perbaikan yang signifikan 3. Pembahasan pencalonan Direktur Bisnis BPR
6	03/05/2024	2	1. Evaluasi kinerja akhir bulan April 2024. 2. Evaluasi pertumbuhan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah 3. Pembahasan kekurangan dokumen pencalonan Direktur Bisnis BPR
7	07/06/2024	2	1. Evaluasi kinerja bulan Mei 2024. 2. Pembahasan Surat OJK tanggal 5 Juni 2024 perihal Keputusan atas pencalonan Direktur Bisnis BPR Juwana Artha Sentosa 3. Evaluasi pertumbuhan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah
8	04/07/2024	2	1. Evaluasi kinerja bulan Juni 2024. 2. Evaluasi SOP Tata Tertib Direksi terkait pemisahan tugas Direktur Utama dan YMK dan Direktur Bisnis, 3. Evaluasi pertumbuhan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah
9	30/09/2024	2	1. Membahas hasil temuan OJK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum bulan Agustus 2024. 2. Pembahasan tindak lanjut dan follow up hasil temuan OJK serta solusi penyelesaiannya. 3. Himbauan agar berhati- hati dalam pemberian kredit. 4. Pemantauan pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM, pelaksanaan Tata Kelola, dan Pelaksanaan Manajemen Risiko
10	18/10/2024	2	1. Membahas perubahan nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat sesuai himbauan dalam Undang - Undang P2SK. 2. Evaluasi Laporan Keuangan bulan September 2024
11	08/11/2024	2	1. Membahas kesiapan penyusunan RBB 2025. 2. Membahas kesiapan implementasi SAK EP dan CKPN 3. Evaluasi kinerja bisnis bank bulan Oktober 2024. 4. Membahas hasil follow up pemenuhan komitmen ke OJK atas pemeriksaan umum bulan Agustus 2024
12	06/12/2024	2	1. Membahas dan menyetujui Laporan RBB 2025 yang disusun oleh Direksi. 2. Evaluasi Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR JAS untuk disesuaikan dengan POJK No 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR. 3. Himbauan kepada Direksi untuk menyusun SOP Anti Fraud dan SOP

CKPN. 4. Membahas kekurangan pencapaian target RBB Desember 2024. 5. Membahas Surat OJK tanggal 28 Nov 2024 perihal Keputusan Perubahan Nama PT Bank Perekonomian Rakyat Juwana Artha Sentosa

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris sudah diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 2 orang.

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Siti Rokhayati,SE	12	0	100%
2	Prabowo Budhy Utomo	12	0	100%

Kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan rapat dalam 1 tahun sebanyak 12 kali hadir secara fisik.

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

L. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	19 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Kecamatan Juwana
	Penjelasan Kegiatan	bantuan sumbangan kepada korban banjir
	Jumlah (Rp)	Rp1.823.500
2.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan peringatan Hari Buruh Internasional
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000

3.	Tanggal Pelaksanaan	06 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Asuhan Ar-Rahmah Pati
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan ke panti asuhan Ar-Rahmah Pati
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	07 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Desa Growong Lor Kecamatan Juwana, Pati
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan bersih desa dan sedekah bumi tahun 2024
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	14 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	02. Kegiatan Politik
	Penerima Dana	Desa Sarirejo, Pati
	Penjelasan Kegiatan	bantuan sumbangan untuk memperingati HUT RI Ke 79
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	12 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	02. Kegiatan Politik
	Penerima Dana	Desa Plangitan Pati
	Penjelasan Kegiatan	bantuan sumbangan untuk memperingati HUT RI Ke 79
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	19 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	02. Kegiatan Politik
	Penerima Dana	Kecamatan Juwana
	Penjelasan Kegiatan	sumbangan partisipasi HUT RI Ke 79 di kecamatan Juwana
	Jumlah (Rp)	Rp600.000



Demikian Laporan Transparansi Tata Kelola Tahun 2024 dibuat sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan SEOJK No.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Pati, 25 April 2025

PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA

Desey Ade Setiyarini, S.Sos
Direktur Utama dan YMFK

Pebruono, SE., MM
Direktur Bisnis